Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 6, No.1, Mei 2026, pp. 296 - 305
p-ISSN: 2808-9022(print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 296

ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Meutia Gunawan[1], Muhammad Husni Mubarok [2], Yuli Antina Aryani[3]
[1]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, e-mail: meutiagunawan05@gmail.com
[2]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, e-mail: mhusnimubarok@polsri.ac.id
[3]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, e-mail: yuliaa@polsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 October 2025
Received in revised form 23 May 2026
Accepted 31 May 2026
Available online 31 May 2026

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the level of budget planning, budget implementation, human resource quality, and the procurement process influence budget absorption within the Regional Government of Ogan Komering Ilir Regency. A quantitative research approach was employed, utilizing primary data collected through structured questionnaires. The study involved 105 respondents representing 35 local government agencies, selected through a purposive sampling technique. Data analysis procedures included instrument testing multiple linear regression analysis, descriptive statistics, traditional assumption tests, validity and reliability checks, and hypothesis testing are all used in this work. Although budget planning, budget implementation, and human resource quality all significantly and favourably affect budget realisation, the data show that the acquisition of products, the acquisition of goods and services has no discernible impact. All things considered, these four elements have a major impact on how well local governments absorb their budgets.

Keywords: Fiscal Capacity, Spending Efficiency, Budget Surplus/Deficit, Government Debt.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan proses pengadaan memengaruhi penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Penelitian ini melibatkan 105 responden yang mewakili 35 instansi pemerintah daerah, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Tahapan analisis data mencakup pengujian instrumen penelitian analisis regresi linier berganda, statistika deskriptif, uji asumsi tradisional, pemeriksaan validitas dan reliabilitas, serta pengujian hipotesis semuanya digunakan dalam studi ini. Meskipun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia semuanya secara signifikan dan menguntungkan memengaruhi realisasi anggaran, data menunjukkan bahwa akuisisi produk dan jasa tidak memiliki dampak yang dapat terlihat. Secara keseluruhan, keempat elemen ini memiliki dampak besar terhadap seberapa baik pemerintah daerah menyerap anggarannya.

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Efisiensi Belanja, Surplus/Defisit Anggaran, Utang Pemerintah

1. PENDAHULUAN

UU No. 23 Tahun 2014 berperan memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengelolaan anggaran. Pasal 280 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, segala proses tersebut perlu dijalankan sesuai dengan prinsip efisiensi,

Received October 22, 2025; Revised May 23, 2026; Accepted May 31, 2026

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

efektivitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Anggaran daerah merupakan perwujudan rencana pembangunan dalam bentuk alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan publik (Mardiasmo, 2018). Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan dan profesionalisme pengelolaan anggaran (Mahmudi, 2019), yang dapat diukur dari tingkat realisasi atau penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran menjadi indikator utama kinerja keuangan daerah serta mencerminkan kemampuan pemerintah menjalankan program. Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, sementara serapan rendah menandakan kelemahan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, serta mengurangi kepercayaan publik. Rendahnya penyerapan sering disebabkan keterlambatan proyek, kendala administrasi, dan keterbatasan SDM. Variasi capaian serapan di tiap daerah menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal, kualitas perencanaan, dan efektivitas pelaksanaan program (Mardiasmo, 2018).

Di Sumatera Selatan tahun 2023, capaian realisasi belanja menunjukkan disparitas antardaerah, menandakan ketimpangan kapasitas teknis dan manajerial. Perencanaan anggaran idealnya partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berorientasi kinerja, karena kelemahan dalam perencanaan akan berdampak pada rendahnya serapan (Mardiasmo, 2018). Cahyani dkk. (2022) menemukan perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan, namun Poeh dkk. (2023) menemukan sebaliknya. Selain itu, pelaksanaan anggaran juga krusial; hasil penelitian Cahyani dkk. (2022) dan Makmur dkk. (2021) menunjukkan pengaruh positif, sementara Rahmawati & Ishak (2022) menemukan tidak signifikan.

Faktor lain adalah kualitas SDM, dimana kompetensi dan integritas aparatur sangat menentukan efektivitas pengelolaan. Kennedy dkk. (2020) dan Poeh dkk. (2023) menunjukkan SDM berpengaruh positif, namun Sartika & Roza (2024) menemukan sebaliknya. Hambatan juga muncul dalam pengadaan barang dan jasa memakan mayoritas anggaran, meski diatur oleh Perpres No. 16/2018, meneka nkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, praktiknya masih terkendala keterlambatan tender dan kesiapan penyedia. Cahyani dkk. (2022) menemukan pengadaan berpengaruh signifikan, sementara Wirawati dkk. (2023) tidak menemukan pengaruh.

Perbedaan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya *research gap* terkait perencanaan, pelaksanaan, SDM, serta proses pengadaan produk dan layanan terkait dengan pencapaian serapan anggaran. Studi ini mereplikasi Lestari & Yuliani (2020) dengan objek berbeda, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi serapan anggaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan muncul karena adanya asymmetric information, yakni ketika agen lebih mengetahui informasi daripada prinsipal, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan yang dimiliki oleh principal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, agen seperti manajer yang diberi kewenangan mengambil keputusan sering kali lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, meskipun dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan penting guna mencegah perilaku oportunistik di lingkungan birokrasi (Hermawan & Sari, 2022). Kondisi seperti lemahnya kontrol terlihat dari masih adanya ketidakefisienan baik pada tahap proses penyusunan maupun realisasi anggaran, rendahnya kapasitas SDM, serta hambatan dalam penyediaan barang dan jasa, yang pada akhirnya menjelaskan mengapa pemerintah daerah kerap mengalami kegagalan dalam menyerap anggaran secara optimal.

2.2. Teori Stakeholders

Teori stakeholders menegaskan bahwa legitimasi pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pencapaian tujuan internal, tetapi juga pada kemampuan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak seperti masyarakat, DPRD, aparatur, penyedia jasa, dan lembaga pengawasan (Freeman, 1984). Konsep ini, menurut Donaldson dan Preston (1995), tidak hanya bersifat etis melainkan juga praktis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif. Oleh karena itu, kebijakan anggaran sejak perencanaan hingga evaluasi harus memperhatikan aspirasi stakeholders agar dokumen anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat. Minimnya partisipasi berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak relevan, sedangkan pada tahap pelaksanaan, keberhasilan realisasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pihak, di mana hambatan teknis atau administratif yang tidak diselesaikan bersama dapat menghambat efektivitas penyerapan anggaran.

2.3. Anggaran Daerah

Anggaran daerah adalah rancangan keuangan tahunan Pemda dan DPRD melaksanakan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui peraturan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran daerah berisi estimasi penerimaan dan pengeluaran yang mendanai operasi pemerintah untuk satu tahun anggaran, sedangkan Halim (2021) menegaskan bahwa anggaran daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Anggaran daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi untuk penyediaan barang dan jasa publik, fungsi distribusi untuk

pemerataan kesejahteraan, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah. PP 12 Tahun 2019 mewajibkan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi guna mewujudkan manajemen keuangan yang sehat di tingkat regional.

2.4. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, kepala daerah bertanggung jawab melaksanakan APBD secara efisien, transparan, dan akuntabel. Penyerapan anggaran menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana tanggung jawab tersebut terlaksana, karena menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, khususnya di tingkat daerah. Menurut Mardiasmo (2018), penyerapan anggaran merupakan proses realisasi dari rencana keuangan tahunan pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan tepat waktu. Namun demikian, Mahmudi (2019) menegaskan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dibelanjakan, tetapi juga karena keuntungan dan efek yang dimilikinya terhadap masyarakat sebagai ukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.5.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah langkah penting dalam manajemen keuangan daerah karena menjadi dasar efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Halim (2021) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran adalah proses sistematis dalam merancang distribusi dana untuk memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Studi yang dilakukan oleh Wirastuti dkk. (2024) menunjukkan bahwa penganggaran yang dilakukan tepat waktu dan berbasis data akurat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

2.5.2 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang menjembatani antara perencanaan dan pencapaian hasil program pemerintah. Merujuk pada PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020, pelaksanaan anggaran dimulai sejak diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mencakup pelaksanaan kegiatan, pencairan dana, penatausahaan, serta pertanggungjawaban belanja secara efisien, efektif, dan akuntabel. Kualitas pelaksanaan anggaran sangat menentukan tingkat keberhasilan program, di mana pelaksanaan yang tidak tepat waktu atau kurang efisien dapat menurunkan realisasi anggaran. Hasil penelitian Makmur dkk. (2021) menunjukkan bahwa tingkat penyerapan belanja pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan anggaran, terutama bila didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan pengendalian internal yang baik.

2.5.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah, karena aparatur yang kompeten mampu memahami regulasi, menjalankan prosedur secara tepat, serta menyesuaikan diri dengan dinamika birokrasi. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa kemampuan teknis dan profesionalisme aparatur sangat menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian Safpremi dkk. (2022) menunjukkan bahwa SDM menjadi faktor dominan dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran karena seluruh kegiatan keuangan bergantung pada kemampuan individu, sementara Poeh dkk. (2023) menemukan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis memiliki efek yang menguntungkan dan patut diperhatikan terhadap seberapa baik anggaran daerah terserap.

2.5.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang direvisi dengan Perpres 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah alur kerja dari identifikasi kebutuhan sampai penyerahan pekerjaan. Proses ini harus diselesaikan secara efektif, terbuka, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip good governance. Pengadaan berperan penting dalam mendukung efektivitas penyerapan anggaran karena berkaitan langsung dengan efisiensi belanja publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut penelitian oleh Poeh et al. (2023), penyerapan anggaran meningkat seiring pengadaan barang dan jasa yang efektif, selaras dengan temuan Ramadhani & Setiawan (2019) yang juga membuktikan efektivitas proses pengadaan mampu meningkatkan realisasi anggaran pemerintah daerah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka pemikiran berdasarkan teori-teori ini, seperti terlihat di Gambar 1:

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

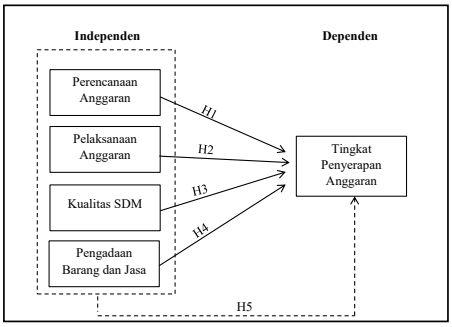

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.7. Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis di riset ini antara lain:

Perencanaan anggaran dapat dikatakan sebagai tahap awal yang memegang peranan utama dalam pengelolaan keuangan daerah karena menentukan arah, sasaran, dan strategi pembangunan. Menurut Halim (2021), kualitas perencanaan ditandai oleh keterpaduan dokumen, akurasi estimasi, dan partisipasi pemangku kepentingan, sedangkan Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa ketidaktepatan perencanaan dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan sehingga serapan anggaran rendah. Astuti & Nugroho (2022) juga membuktikan bahwa adanya perencanaan yang tepat memberikan pengaruh signifikan terkait dengan efektivitas penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, diajukan hipotesis:

H1: Perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selain perencanaan, efektivitas penyerapan juga ditentukan oleh pelaksanaan anggaran. Mahmudi (2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan mencakup pengadaan, penatausahaan, dan pencairan dana yang harus tepat waktu dan akuntabel, sedangkan Mardiasmo (2018) menyoroti bahwa keterlambatan administrasi dan lemahnya pengawasan dapat menghambat serapan anggaran. Aturan mengenai pelaksanaan didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas. Cahyani dkk. (2022) menemukan pengaruh positif meski tidak signifikan karena kendala administrasi, sementara Makmur dkk. (2021) membuktikan adanya pengaruh signifikan bila pelaksanaan dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, hipotesis diajukan:

H2: Pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kualitas SDM menjadi faktor penting dalam pengelolaan anggaran karena mencakup kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta integritas aparatur. Robbins & Judge (2020) mendefinisikan kualitas SDM sebagai kemampuan individu dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, sedangkan Moeheriono (2014) menegaskan kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aparatur yang tidak kompeten berpotensi menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian Poeh dkk. (2023) dan Putra dkk. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis secara positif memengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga, hipotesis yang dikemukakan ialah:

H3: Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Belanja daerah didominasi oleh pengadaan barang dan jasa sebagai penentu utama pencapaian anggaran. Sesuai Ketentuan tentang Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan harus efisien, transparan, adil, dan akuntabel. Halim & Abdullah (2016) menekankan bahwa keterlambatan tender, kesalahan spesifikasi, atau penyedia yang tidak kompeten dapat menurunkan serapan anggaran. Astuti & Nugroho (2022) menemukan pengaruh signifikan pengadaan terhadap serapan, khususnya proyek infrastruktur, sementara Firmansyah (2021) menyatakan pengaruhnya tidak signifikan karena kendala administratif. Dengan demikian, hipotesis diajukan:

H4: Pengadaan barang serta jasa memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif yang menurut Sugiyono (2022) dimaksudkan untuk menguji teori dengan cara melakukan pengukuran terhadap variabel serta menganalisis data secara statistik guna menjelaskan hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian primer, di mana informasi dikumpulkan langsung dari responden melalui penyebaran angket atau kuesioner. Populasi penelitian mencakup seluruh ASN pada 35 OPD di area Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden. Instrumen penelitian memakai skala Likert dengan skor 1 mewakili "Sangat Tidak Setuju" dan skor 5 "Sangat Setuju"..

Pengolahan data dilaksanakan menggunakan bantuan *software SPSS 26 for Windows*, yang berfungsi untuk menguji asumsi klasik maupun hipotesis sehingga hasil pengolahan data lebih akurat. Teknik analisis yang diterapkan meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas), regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran (Indikator)	Skala
Penyerapan Anggaran (Y)	1. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target yang hendak dicapai. 2. Realisasi penyerapan anggaran per triwulan. 3. Kesesuaian dalam pelaksanaan program atau kegiatan serta ketetapan waktu dalam jadwal penyerapan anggaran. (Harapap dkk., 2020)	Likert (1-5)
Perencanaan Anggaran (X_1)	1. Komprehensif 2. Terperinci 3. Disiplin 4. Fleksibel 5. Prioritas 6. Keterbukaan (Fitria & Syarah, 2016)	Likert (1-5)
Pelaksanaan Anggaran (X_2)	1. Budaya Kerja 2. Penyelesaian Administrasi. 3. Proses Pemeriksaan SPJ. 4. Jadwal Anggaran Kas. (Lestari & Yuliani, 2022)	Likert (1-5)
Kualitas SDM (X_3)	1. *Knowlegde* 2. *Skills* 3. *Attitude* (Moeherindo, 2014)	Likert (1-5)
Pengadaan Barang dan Jasa (X_4)	1. Efisien 2. Efektif 3. Terbuka dan bersaing 4. Transparan 5. Adil 6. Akuntabel (Lestari & Yuliani, 2022)	Likert (1-5)

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Responden

Tabel 2. Deskripsi Responden

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	58	52,44%
b. Perempuan	32	33,27%
Total	**90**	**85,71%**
Usia		
a. 20-40 Tahun	31	29,52%
b. 41-50 Tahun	43	40,95%
c. >50 Tahun	16	15,24%
Total	**90**	**85,71%**
Pendidikan Terakhir		
a. D3	11	10,48%
b. D4/S1	56	53,33%
c. Lainnya	23	21,90%
Total	90	85,71%
Lama Bekerja		
a. 1-10 Tahun	13	12,38%
b. 11-20 Tahun	39	37,14%
c. >20 Tahun	38	36,19%
Total	**90**	**85,71%**

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2 menampilkan profil responden yang berjumlah 90 orang dari total 105 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sampel penelitian. Dari jumlah tersebut, terdapat 58 responden laki-laki (52,44%) dan 32 responden perempuan (33,27%). Berdasarkan kategori usia, sebanyak 31 responden (29,52%) berusia antara 20 hingga 40 tahun, 43 responden (40,95%) berada pada rentang usia 41–50 tahun, sedangkan 16 responden (15,24%) berusia di atas 50 tahun. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 11 orang (10,48%), sedangkan mayoritas responden berpendidikan D4/S1 sebanyak 56 orang (53,33%), dan sisanya 23 orang (21,90%) memiliki tingkat pendidikan lainnya. Dari segi masa kerja, sebanyak 13 responden (12,38%) memiliki pengalaman kerja 1–10 tahun, 39 responden (37,14%) telah bekerja selama 11–20 tahun, dan 38 responden (36,19%) berkarier lebih dari 20 tahun.

4.2 Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas, seluruh butir kuesioner valid (r hitung > r tabel), dan uji reliabilitas menunjukkan setiap butir mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka instrumen studi bisa dikategorikan andal dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk menguji kenormalan residual model regresi. Gambar 2 menampilkan pola normal *probability plot* yang titik-titiknya membentuk pola yang sejajar dengan garis diagonal, bisa disimpulkan bahwa data model regresi berdistribusi normal.

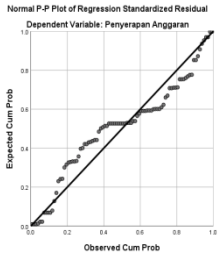

Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot*

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance perencanaan anggaran memiliki nilai 0,708, pelaksanaan anggaran 0,706, kualitas SDM 0,890, serta pengadaan barang dan jasa 0,645, menurut hasil uji multikolinearitas. Masing-masing nilai ini lebih tinggi dari kriteria minimal 0,10. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengadaan barang dan jasa semuanya memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu sebagai berikut: 1,412, 1,416, dan 1,551, masing-masing. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa variabel independen bebas dari multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas igunakan untuk mendeteksi perbedaan *variance* residual antar pengamatan.

Menurut Gambar 3, titik-titik pada diagram sebar tersebar secara acak dan tanpa pola yang dapat dikenali di

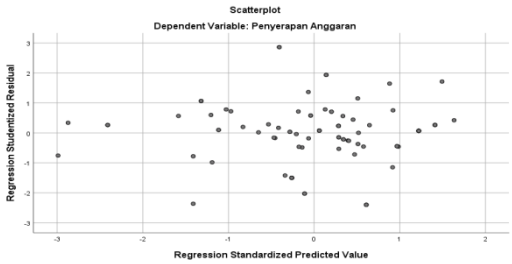

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

sekitar garis nol, menunjukkan tidak ada bukti heteroskedastisitas. Model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan oleh karena itu layak untuk digunakan.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Statistik t

Tingkat kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap perubahan pada variabel dependen secara independen ditentukan menggunakan statistik uji-t.

Tabel 3. Uji Statistik t

Coefficients[a]

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	6.608	3.813		1.733	.087
Perencanaan Anggaran	.480	.082	.537	5.890	.000
Pelaksanaan Anggaran	.305	.080	.347	3.794	.000
Kualitas SDM	.191	.093	.168	2.059	.043
Pengadaan Barang dan Jasa	-.147	.079	-.178	-1.857	.067

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Tabel 3 didapat persamaan berikut ini:

$$Y = 6{,}608 + 0{,}480X_1 + 0{,}305X_2 + 0{,}191X_3 - 0{,}147 + e$$

Menurut analisis regresi berganda pada Tabel 3, koefisien regresi perencanaan anggaran sebesar 0,480 dan pelaksanaan anggaran senilai 0,305, koefisien regresi kualitas SDM adalah 0,191, dan koefisien regresi pengadaan produk dan layanan adalah -0,147. Koefisien regresi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan kualitas SDM masing-masing memiliki hasil positif, sehingga setiap peningkatan pada ketiga variabel tersebut akan mendorong peningkatan penyerapan anggaran, dengan kontribusi terbesar berasal dari perencanaan anggaran, diikuti oleh pelaksanaan dan kualitas SDM. Sebaliknya, variabel terkait pengadaan barang atau jasa memperlihatkan hasil koefisien negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada aspek ini justru berpotensi menurunkan tingkat serapan anggaran.

4.4.2 Uji F

Berdasarkan hasil uji F, nilai Ftabel adalah 2,48, dan nilai F, pada tingkat signifikansi 0,000, adalah 21,154. Mengingat nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai Fhitung lebih tinggi dari nilai Ftabel (21,154 > 2,48), dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel Perencanaan Anggaran (X_1), Pelaksanaan Anggaran (X_2),

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Kualitas Sumber Daya Manusia (X_3), serta Pengadaan Barang dan Jasa (X_4) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Anggaran (Y).

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,499 variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, dan pengadaan barang/jasa menjelaskan 49,9% variasi serapan anggaran, sedangkan 50,1% dipengaruhi faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Temuan dari uji hipotesis pertama menyatakan bahwa perencanaan anggaran signifikan meningkatkan penyerapan. Ini menandakan bahwa perencanaan yang baik dan sistematis mampu meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, terutama pada aspek prioritas dan keterperincian, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal fleksibilitas dan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2021) serta indikator yang dikemukakan Fitria & Syarah (2016) yang menekankan pentingnya sinkronisasi, ketepatan kebutuhan, dan perencanaan yang terukur.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori keagenan, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dapat menekan potensi moral hazard serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan keuangan. Dukungan empiris juga ditunjukkan oleh penelitian Astuti & Nugroho (2022) yang mengungkapkan bahwa kualitas perencanaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Untuk itu, perencanaan yang terencana dengan baik tidak hanya berperan untuk menjamin realisasi kegiatan tepat waktu, namun juga mengacu pada alokasi dana yang sudah ditentukan.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Temuan studi mengindikasikan thitung sebesar 3,794, lebih besar dari t-tabel 1,988, dan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga hasil signifikan, mengindikasikan pelaksanaan anggaran secara signifikan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran. Temuan ini memperlihatkan ketepatan administrasi, pengelolaan kas, dan disiplin kerja berperan penting dalam memperlancar serapan anggaran (Lestari & Yuliani, 2022). Sejalan dengan teori stakeholders (Freeman, 1984), koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan dibutuhkan agar kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran, sementara teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menekankan akuntabilitas sebagai upaya menghindari konflik kepentingan. Hasil ini diperkuat oleh Makmur dkk. (2021) serta Cahyani dkk. (2022) yang menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran yang tertib mendukung optimalisasi serapan, sedangkan hambatan administratif dapat menurunkan efektivitasnya.

3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil analisis mengindikasikan bahwa kualitas SDM berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, yang ditunjukkan lewat nilai t-hitung yang lebih tinggi dibanding t-tabel serta nilai signifikansi < 0,05. Hasil ini menegaskan bahwa aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana dijelaskan Moeheriono (2014) sangat menentukan kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat waktu. SDM yang berkualitas mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dengan prinsip *good governance*, sekaligus meminimalkan potensi moral hazard sebagaimana dikemukakan teori keagenan. Aparatur yang memahami regulasi dan sistem keuangan daerah juga lebih siap menghindari kesalahan administrasi maupun keterlambatan realisasi. Hasil ini diperkuat oleh Poeh dkk. (2023) serta Putra dkk. (2021) menunjukkan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

4. Pengaruh Pengadaan Barang atau Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Dari hasil analisis diperoleh bahwa variabel pengadaan barang dan jasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlihatkan oleh nilai t-tabel sebesar 1,988 yang lebih besar dari t-hitung sebesar -1,857 dan signifikansi 0,067 berada diatas 0,05. Kondisi ini mengindikasikan meskipun pengadaan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan anggaran, hambatan administratif seperti keterlambatan penetapan SK pejabat pengelola keuangan, pengangkatan panitia lelang, serta ketidaktepatan standar biaya menghambat proses realisasi (Halim & Abdullah, 2016). Indikator pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Lestari & Yuliani, 2022) juga belum berjalan optimal, terlihat dari keterlambatan lelang, perubahan spesifikasi, hingga rendahnya kompetensi penyedia

jasa. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan rendahnya serapan anggaran, berbeda dengan temuan Poeh dkk. (2023) serta Ramadhani & Setiawan (2019) yang menemukan pengaruh positif signifikan. Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan kesesuaian dengan Firmansyah (2021) yang menegaskan adanya hambatan administratif sistemik yang membuat pengadaan tidak efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuisisi produk atau layanan tidak memengaruhi penyerapan anggaran maupun variabel perencanaan, pelaksanaan, dan kualitas SDM semuanya memiliki dampak positif dan signifikan. Perencanaan yang terstruktur dengan baik, pelaksanaan tertib, serta kualitas aparatur yang kompeten terbukti mampu meningkatkan efektivitas realisasi anggaran, meskipun aspek pengadaan masih menghadapi kendala. Namun secara simultan, keempat variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan, sehingga serapan anggaran daerah merupakan hasil sinergi dari berbagai faktor yang saling mendukung. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu memperkuat perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta memanfaatkan data sektoral secara optimal. Di sisi lain, perbaikan dalam sistem pengadaan melalui pemanfaatan *e-procurement*, penerapan transparansi, serta pengawasan ketat terhadap penyedia sangat diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan akuntabel. Disarankan agar subjek penelitian diperluas ke wilayah lain untuk studi selanjutnya atau mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna menelaah faktor non-teknis seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan inovasi kebijakan fiskal yang juga berpengaruh pada penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R., & Nugroho, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 122–135.

Cahyani, R. D., Thoyib, M., & Armaini, R. (2022). Faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kota Palembang. *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, 4(1), 41-46.

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholders theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, 20(1), 65–91.

Firmansyah. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 101–112.

Fitria, N., & Syarah, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(8), 1–20.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Boston: Pitman.

Halim, A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Abdullah, S. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hermawan, A., & Sari, D. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 78–88.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *13*(Vol.13 No. 2 (2020)), 108–117.

Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology,* (648–663). Magelang. e-ISSN: 2828-0725.

Mahmudi, M. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Makmur, M., Patra, A. D. A., & Wahida, A. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran organisasi perangkat daerah (Studi pada pemerintah kota Palopo)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Poeh, M. M., Ndun, G., Kefi, D. Y., & Dioh, S. S. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit*, 6(2), 69-77.

Putra, F. B., Zarefar, A., & Kennedy (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 14(2), 221-230.

Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*. 1(1), 180–189.

Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2B), 710–726.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational Behavior (18th ed.)*. New Jersey: Pearson Education.

Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Perencanaan dan Kualitas SDM terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. *Jurnal Ekonomi Publik*, 6(2), 77–90

Sartika, D., & Roza, S. J. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Kabupaten Aceh Jaya. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan,* 7(1), 46-57.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wirastuti, K., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 15(1), 35–45.

Wirawati, A., Fatimah, S., & Sujadi. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020–2022. *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 5(2).